

Sambungan dari.....Hal 1

Dana Desa Rp5 Miliar Mengendap

Tahun ini masih ada beberapa desa yang belum menyelesaikan pencairan dana transfer tahun 2019, atau yang biasa disebut dengan luncuran. "Petunjuk atasan memang agar 2020 zero luncuran. Kami staf pemdes sudah berusaha. Namun itulah hasilnya 95,2 persen," kata Kasi Tata Pemerintahan DPMD Karawang Andry Irawan kepada Radar Karawang, Selasa (28/1).

Dikatakan Andry, tahun ini ada empat desa yang belum mencairkan alokasi dana desa (ADD) tahap 4 tahun 2019. Kemudian untuk Dana Bagi Hasil (DBH) tercatat ada 27 desa. "Realisasi sebesar Rp106,7 miliar dari Rp112 miliar. Atau 95,2 persen," ujarnya.

Menurutnya tahun ini jumlah

luncuran lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Karena pada tahun 2019 jumlah luncuran DBH terhitung 261 desa. Sedangkan untuk realisasi ADD ada 6 desa. Penurunan itu dikarenakan intensifnya pembinaan penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) dan mempercepat waktu penyaluran yaitu bulan Maret. "Pertama kami intensifkan pembinaan penerapan siskeudes. Kemudian mempercepat waktu saluran, yaitu bulan Maret," jelasnya.

Selain DBH dan ADD, bantuan dari pemerintah pusat untuk desa yang dinamakan Dana desa juga tidak terserap. Dana desa tahun anggaran 2019 itu belum diserap oleh delapan desa yang ada di

Kabupaten Karawang dengan jumlah Rp5.166.758.400. "Untuk dana desa masih ada delapan desa lagi," tambah Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi DPMD Karawang Agus Somantri.

Kepala DPMD Karawang Agus Mulyana mengatakan, untuk memaksimalkan proses pencairan dana-dana transfer untuk desa. Ia akan melakukan kordinasi dan evaluasi agar kedepannya tidak ada desa yang terlambat mengusulkan sehingga banyak luncuran. "Nanti kita evaluasi apa yang menjadi faktor penyebabnya. Kita akan lakukan inovasi-inovasi setelah diketahui penyebabnya," ucap mantan sekretaris DPRD Karawang itu. **(nce)**